

## Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes (Studi Kasus Desa Purwamekar Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang)

Evi Priyanti<sup>1\*</sup>, Dimas Rangga Agustin<sup>2</sup>, Widya Indah Pradani<sup>3</sup>, Diana Noviyanti<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Tim., Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361

\*[evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id](mailto:evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id)

### ABSTRAK

#### Artikel Info

**Received :**  
09 June 2021

**Revised :**  
09 June 2021

**Accepted :**  
30 June 2021

Pemerintahan desa dan BUMDes merupakan organisasi yang terpisah tetapi saling berhubungan. BUMDes di Kabupaten Karawang masih banyak yang belum optimal padahal jika dioptimalkan bisa menambah perekonomian masyarakat desa lebih meningkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa BUMDes Desa Purwamekar memiliki beberapa jenis usaha yaitu konveksi, peternakan dan perikanan serta usaha perkayuan. Manajemen pengelolaan BUMDes di Desa Purwamekar sebenarnya memiliki hasil yang cukup baik, yang dibuktikan dengan adanya usaha unggulan yang dimiliki yaitu usaha konveksi tas. Usaha konveksi tas ini telah berhasil memasarkan produknya hingga tembus pada toko-toko di pasaran, tetapi saat ini usaha konveksi tas tengah mengalami penurunan yang sangat drastis akibat pandemi covid-19 sehingga menghentikan produksinya untuk sementara. Dana BUMDes pun untuk saat ini sedang dialihkan oleh pemerintah desa untuk menangani dalam situasi pandemi covid-19 di Desa Purwamekar. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa manajemen pengelolaan BUMDes di Desa Purwamekar untuk saat ini belum berjalan dengan maksimal dan terhenti akibat adanya pandemi covid-19, sehingga Pemerintah Desa Purwamekar sedang mengalokasikan dana BUMDes sementara untuk penanganan covid-19.

**Kata Kunci :** BUMDes, Manajemen Pemerintahan Desa, Pandemi covid-19

***Village Government Management in Increasing BUMDes Productivity  
(Case Study of Purwamekar Village, Rawamerta District,  
Karawang Regency)***

**ABSTRACT**

*Village administration and BUMDes are separate but interconnected organizations. Based on the results of the research, the BUMDes of Purwamekar Village has several types of businesses, namely convection, livestock and fisheries as well as timber businesses. The management of BUMDes in Purwamekar Village actually has quite good results, which is proven by the existence of its superior business, namely the bag convection business. This bag convection business has successfully marketed its products to penetrate stores in the market, but currently the bag convection business is experiencing a very drastic decline due to the Covid 19 pandemic, so it has been forced to temporarily halt its production. BUMDes funds are currently being transferred by the village government to handle the Covid-19 pandemic in Purwamekar Village. The research method used in this study is a qualitative method, with this method the researchers obtained the results that the management of BUMDes in Purwamekar Village is currently not running well and has stopped due to the Covid-19 pandemic, the Purwamekar Village Government is allocating temporary BUMDes funds for handling covid-19.*

**Keywords :** *BUMDes, Village government management, Covid-19 pandemic*

**PENDAHULUAN**

Manajemen yang baik dalam pembangunan desa memiliki banyak aspek dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Pada kenyataannya, masyarakat pedesaan masih memiliki berbagai sumber daya yang terbatas, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal. Hubungan kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat membentuk hubungan yang baik dalam prosesnya melaksanakan pembangunan pedesaan. Untuk mencapai hasil pembangunan yang sebesar-besarnya, kuncinya adalah dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai penyelesaian pembangunan, disertai perlunya pengelolaan yang sistematis. Dalam hal lain, system manajemen tata kelola adalah alat internal yang sangat diperlukan dalam pengelolaan pembangunan pedesaan yang berperan dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu, kemampuan aparat pemerintahan desa sebagai determinan penyelenggara manajemen pemerintahan desa harus memiliki kemampuan menciptakan nilai keadilan dalam proses pembangunan pedesaan. Nilai keadilan terkait dengan realisasi hak sipil, dan pemerintah desa harus merealisasikan hak tersebut secara utuh.

Pengertian Pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dapat dikatakan berhasil jika masyarakat yang ada di dalamnya memiliki kesejahteraan yang baik, untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut desa memiliki salah satu fungsi melakukan pembangunan dan melaksanakan pembinaan perekonomian desa. Maka dari itu, desa memiliki lembaga yang bernama Badan Usaha Milik Desa yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa.

BUMDes ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan usaha perekonomian dari masyarakat desa yang perlu adanya dukungan dari pemerintah sebagai basis pengembangan industri kecil menengah atau UMKM. Kabupaten Karawang memiliki 30 kecamatan dan 309 desa, salah satu desa yaitu Desa Purwamekar yang berada di Kecamatan Rawamerta. Desa Purwamekar memiliki jumlah penduduk sebesar 2918 jiwa, jadi dengan jumlah masyarakat yang cukup besar tingkat kesejahteraan ekonomi harus di perhatikan, seperti desa yang lainnya Desa Purwamekar juga memiliki lembaga yang menangani kesejahteraan ekonomi masyarakatnya yaitu BUMDes, terdapat beberapa jenis kegiatan BUMDes diantaranya pembuatan kusen, peternakan ikan dan ayam serta konveksi. Pengelolaan BUMDes ini melibatkan beberapa pihak terutama dari masyarakat setempat dan pemerintah desa, untuk meningkatkan produktifitas BUMDes di Desa Purwamekar maka diperlukan manajemen pemerintahan desa yang baik dalam pengelolaan produktivitas BUMDes. Akan tetapi melihat situasi pandemic sekarang ini, produktivitas BUMDes di Desa Purwamekar kurang maksimal karena anggaran yang teralokasi untuk menangani pandemi ini lebih diutamakan.

## KAJIAN TEORI

### Manajemen Pemerintahan

Pengertian Manajemen pemerintahan menurut Istianto, dapat diartikan yakni bagaimana cara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan (Istianto, 2011: 29). Adapun pengertian manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.” Lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi manajemen pemerintahan menurut Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 antara lain :

1. Fungsi dari perencanaan pemerintahan adalah dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan konkret dan terukur dalam organisasi.
2. Fungsi dari pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan adalah relisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.

3. Fungsi dari Penggunaan sumber-sumber pemerintahan adalah dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah di tetapkan.

Fungsi dari kontrol pemerintahan adalah dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

Pengertian selanjutnya menurut George R. Terry dalam bukunya berjudul “*Principles of Management*” memberikan definisi manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga G R Terry mengatakan bahwa :

1. Perencanaan memiliki arti yakni memilih fakta-fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Pengorganisasian memiliki arti yakni penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini penyediaan factor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan.
3. Pelaksanaan atau penggerakan, memiliki arti penggerakan memiliki arti yakni membangkitkan atau mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.
4. Pengawasan, memiliki arti yakni sebagai proses penentuan apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Berdasarkan teori manajemen menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen itu terdiri dari beberapa fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, maka manajemen pemerintahan merupakan cara sebuah organisasi dalam mengatur pelaksanaan tugasnya supaya menjadi efektif dan efisien.

### **Pemerintahan Desa**

Pengertian pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa menurut Widjaja (2003:3) pemerintahan desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Adapun menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa

dan perangkat desa untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

BUMDes menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang sangat berguna organasasi aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, menerangkan bahwa badan usaha milik desa merupakan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dianalisis BUMDes merupakan sebuah organisasi yang dimiliki oleh desa dimana sebagian besar modalnya berasal dari desa melalui penyertaan dari kekayaan desa yang sangat berguna terhadap perekonomian masyarakat desa.

### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiono pengertian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti di tempatkan sebagai instrumen inti, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui informan atau orang-orang yang yang berkaitan dengan topik penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini diantaranya aada data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang peneliti dapatkan berasal dari kawan yang kebetulan memiliki hubungan dengan perangkat desa di desa Purwamekar. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung kepada pengumpul data. Data primer yang peneliti dapatkan yaitu langsung melakukan interaksi dengan perangkat desa dan masyarakat desa dengan metode observasi dan wawancara.

Analisis data menurut Miles dan Huberman adalah proses mengorganisasikan dan mengurus data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Miles terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi untuk penelitian di Kantor Desa Purwamekar dan rumah pengusaha konveksi tas karena lokasi ini memiliki hal yang menarik untuk di teliti terutama dalam bidang usaha konveksi tas yang menjadi usaha unggulan yang dimiliki oleh Desa Purwamekar.



Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2021. Penelitian ini diharapkan dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peneliti maupun bagi masyarakat Desa Purwamekar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perencanaan Strategis Desa Purwamekar Untuk Meningkatkan Produktivitas Bumdes**

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Purwamekar, perencanaan sebelum terjadinya pandemi covid-19, pemerintah desa Purwamekar dalam rangka meningkatkan produktivitas memiliki strategi dengan mencari usaha milik masyarakat desa yang berpotensi unggul. Pemerintah desa berencana mencari informasi mengenai tempat usaha milik masyarakat desa yang berpotensi dimana nantinya akan mengajak masyarakat bekerja sama dengan BUMDes dengan tujuan peningkatan produktivitas BUMDes serta memberdayakan masyarakat desa.

Semenjak pandemi datang, pemerintah desa Purwamekar melakukan restrukturisasi BUMDes. Restrukturisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dimana mereka melakukan perbaikan sumber daya manusianya dalam suatu badan atau lembaga dengan tujuan memperbaiki kinerja sebuah usaha yang dijalankan. Dalam hal ini, restrukturisasi BUMDes berarti kegiatan untuk memperbaiki struktur organisasi yang mengelola/mengurus BUMDes itu sendiri. Pemerintah desa Purwamekar berpendapat bahwa penyebab dilakukannya restrukturisasi struktur organisasi BUMDes karena selain menjunjung nilai-nilai yang sifatnya demokratis, hal tersebut perlu dilakukan demi kelangsungan BUMDes itu sendiri. Maksudnya ialah dengan dilakukannya restrukturisasi tersebut diharapkan BUMDes bisa memunculkan ide atau gagasan yang terbaharukan dan terlaksana sesegera mungkin sehingga desa Purwamekar ini dapat mendapatkan dampak yang baik dengan arahan dan bantuan dari BUMDes.

Audit kredit dari debitur (peminjam) terhadap bumdes, penyaluran bumdes dilakukan melalui modal usaha, dan modal kelompok wanita tani (KWP). Sumber dana BUMDes selain dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah baik itu pemerintah desa maupun pemerintah tingkat atas, sumber dana yang didapat bisa berasal dari pinjaman. Pinjaman yang didapat bisa berasal pihak ketiga seperti bank (negeri maupun swasta), lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan lain-lain.

### **Pengorganisasian Desa Purwamekar Dalam Proses Kegiatan Upaya Peningkatan Produktivitas BUMDes**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Purwamekar, bahwa pengorganisasian dalam meningkatkan produktivitas bumdes adalah solidaritas serta kerja dari tiap-tiap lini di tingkat struktur Bumdes. Jabatan-jabatan yang ada di struktur bumdes harus benar-benar berperan. Sebenarnya pemerintah desa tidak mempunyai hak intervensi terhadap kewenangan yang dilakukan oleh bumdes karena bumdes sudah memiliki strukturnya sendiri. Hanya saja program dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh bumdes harus dibuat proposal atau ajuan baik untuk pengucuran dana program kerja kemudian bisa disampaikan ke desa untuk mendapatkan persetujuan.

## **Pelaksanaan Yang Dilakukan Desa Purwamekar Dalam Meningkatkan Produktivitas BUMDes**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Purwamekar, seperti yang dijelaskan dalam proses perencanaan, Pemerintah desa Purwamekar dimana BUMDes dalam hal ini melakukan interaksi langsung dengan masyarakat desa dan mengajak masyarakat yang memiliki usaha untuk bekerja sama dengan BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dadi selaku pemilik konveksi tas, masyarakat desa Purwamekar pun diberikan edukasi mengenai manfaat yang akan didapatkan jika Pemerintah desa dan tempat usaha milik masyarakat desa berkolaborasi diantaranya yaitu menumbuhkan perekonomian dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa. Lalu Pemerintah desa Purwamekar juga memberikan bantuan berupa modal yang akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki tempat usaha untuk keperluan persediaan yang dibutuhkan untuk memulai usaha mereka.

Desa Purwamekar memiliki beberapa jenis usaha dalam meningkatkan produktivitas BUMDes yaitu pada bidang konveksi, perkayuan, peternakan, perikanan, serta simpan pinjam (KWP). Konveksi adalah sebuah usaha produksi berbahan tekstil (pakaian, tas, dan lain-lain) yang dibuat secara massal, konveksi adalah industri skala rumah tangga. Perkayuan (kusen) adalah sebuah jenis usaha yang mengolah bahan mentah (kayu) menjadi perabot rumah seperti kusen pintu, jendela dan lain-lain.

Pengertian peternakan adalah kegiatan mengembang biakan dan pemeliharaan hewan ternak (ayam, kambing, domba, sapi, dan lain-lain) untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Adapun pengertian perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan (pemancingan). Sedangkan pengertian Simpan pinjam adalah jenis usaha yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat melalui usaha simpan pinjam yang dikelola secara individu dibawah badan usaha milik desa yang dibentuk oleh pemerintah desa. Diantara beberapa jenis usaha yang dimiliki desa purwamekar, ada satu jenis usaha yang paling unggul yaitu usaha konveksi tas.

Restrukturisasi BUMDes untuk saat ini masih tertunda dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga perhatian pemerintah desa Purwamekar saat ini lebih terfokuskan menangani dampak covid-19. Oleh karena itu, saat ini struktur organisasi di BUMDes desa Purwamekar masih kosong. Namun menurut hasil wawancara peneliti dengan pemerintah desa saat itu, BUMDes sebelum adanya covid-19 ini berjalan dengan normal dengan laporan yang memang cukup bagus. Dimana tempat usaha milik masyarakat yang telah bermitra dengan BUMDes telah memberikan dampak baik bagi masyarakat desa. Perekonomian masyarakat desa Purwamekar semakin baik dan lancar dalam proses pemasarannya. Misalkan usaha milik masyarakat desa di bidang konveksi seperti tas, usaha tersebut merupakan usaha yang memang cukup tinggi akan permintaan dari pasar bahkan pemasarannya telah mencapai luar daerah seperti Garut.

Proses pinjaman yang dilakukan BUMDes jika diperlukan dikarenakan minim/kurangnya dana yang dimiliki. Dana pinjaman ini bertujuan untuk membantu pendanaan yang ditujukan untuk kepentingan bersama dimana salah satunya ialah memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha di desa yang nantinya diharapkan bisa semakin maju dan berdampak baik bagi BUMDes maupun masyarakat desa Purwamekar.

Berikut produktivitas BUMDES yakni jenis usaha di Desa Purwamekar :

**Tabel 1.** Jenis Usaha di Desa Purwamekar

No	Jenis Usaha	Keterangan
1	Konveksi	pakaian, tas, dll
2	Perikanan	pemancingan
3	Peternakan	ayam, kambing, domba, sapi, dll
4	Perkayuan	kusen pintu, jendela dll
5	Simpan Pinjam	penghimpunan dan penyaluran dana

Sumber : Olahan peneliti.

### **Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan BUMDes di Desa Purwamekar**

Demi keberlancaran kegiatan BUMDes, pemerintah desa Purwamekar terdapat penasihat dan pengawas. Penasihat di mana di pemerintah desa Purwamekar kepala desa sendirilah yang bertugas memberikan bimbingan serta arahan kepada BUMDes terkait program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan tugas pengawasan diberikan kepada ketua BPD yang bertanggung jawab. memonitoring setiap tindakan dan kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes. Tidak hanya itu, tugas pengawas juga memperhatikan struktur bumdes yang sudah dibentuk, pengawasan terhadap audit anggaran dari kreditor. Bentuk pengawasan berbentuk audit baik secara administrasi, penyaluran dana, perkembangan jumlah keuangan baik itu silva, neraca, dan sebagainya.

Hambatan yang dialami pemerintah desa Purwamekar yaitu macetnya keuangan di debitur yang dikredit oleh BUMDes, sehingga penyaluran dana untuk berbagai keperluan menjadi terlambat. Menurut Bapak Dadi selaku pemilik konveksi tas, macetnya keuangan mempengaruhi percepatan proses produksi usaha yang tengah melonjak pada permintaan pasar di mana ketersediaan bahan baku berkurang karena terlambatnya penyaluran dana dari BUMDes. Dan setelah adanya pandemic covid-19 memperburuk situasi dan juga permintaan pasar semakin menurun drastis sehingga sulit untuk melanjutkan usaha konveksi tas tersebut. Bapak Dadi juga sempat melakukan penjualan tas secara online, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Sekretaris Desa Purwamekar juga mengatakan bahwa hambatan lainnya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDes yang seakan-akan mengira bahwa uang dari BUMDes adalah uang hibah sehingga masyarakat merasa tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan bagi hasil dan terkadang uang yang diberikan dipakai untuk keperluan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat dianalisis bahwa manajemen pemerintahan Desa Purwamekar dalam pengelolaan BUMDes terhambat karena situasi pandemi Covid-19 di Tahun 2020 sampai 2021 sekarang, selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan produktivitas BUMDes itu sendiri.

### **SIMPULAN**

1. Pemerintah desa Purwamekar berencana me-restrukturisasi BUMDes. Restrukturisasi BUMDes berarti kegiatan untuk memperbaiki struktur organisasi yang mengelola/mengurus BUMDes itu sendiri. Kemudian, perencanaan berkaitan dengan audit kredit dari debitur (peminjam) terhadap bumdes, penyaluran bumdes dilakukan melalui modal usaha, dan modal kelompok wanita tani (KWP).
2. Pengorganisasian yang dibangun di desa Purwamekar yaitu pemerintah desa tidak



- mempunyai hak intervensi terhadap kewenangan yang dilakukan oleh BUMDes karena BUMDes sudah memiliki strukturnya sendiri. Hanya saja program dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh BUMDes harus berdasarkan izin dan koordinasi dalam urusan pencairan dana.
3. BUMDes dalam hal ini melakukan interaksi langsung dengan masyarakat desa dan mengajak masyarakat yang memiliki usaha untuk bekerja sama dengan BUMDes. Masyarakat desa Purwamekar pun diberikan edukasi mengenai manfaat yang akan didapatkan jika Pemerintah desa dan tempat usaha milik masyarakat desa berkolaborasi diantaranya yaitu menumbuhkan perekonomian dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa. Lalu Pemerintah desa Purwamekar juga memberikan bantuan berupa modal yang akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki tempat usaha untuk keperluan persediaan yang dibutuhkan untuk memulai usaha mereka.
  4. Tugas pengawasan diberikan kepada ketua BPD yang bertanggungjawab memonitoring setiap tindakan dan kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes. Tidak hanya itu, tugas pengawas juga memperhatikan struktur BUMDes yang sudah dibentuk, pengawasan terhadap audit anggaran dari kreditor.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Creswell, John.W .( 2013). *Reseach Design ( Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)* Edisi Ketiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*
- Wasistiono, Sadu (2007). *Prospek Pengembangan Desa*.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan Ketiga, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.